**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat ayat (1) menjelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Namun masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian dan pemerintah setempat cenderung menunggu penduduk untuk melaporkan peristiwa kematian membuat rendahnya jumlah akta kematian yang di terbitkan, hal ini lah mendorong pemerintah Kabupaten Kaur untuk menertibkan permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul tentang **“PELAYANAN PENERRBITAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU”.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan penerbitan akta kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur serta hambatan dalam memberikan pelayanan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif teknik analisis statistik deskirptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisioner atau angket, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pelayanan penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, serta mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. Namun masih ada keluhan lain yang muncul dari masalah oknum pegawai dan sarana pendukung pelayanan yang kurang memadai.

Saran yang penulis kemukakan untuk dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kaur agar lebih meningkatkan pelayanan penerbitan akta kematian yang sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bimbingan untuk seluruh pegawai dan melengkapi sarana pendukung agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik.

**ABSTRACT**

Law Number 24 Year 2013 regarding Population Administration Article 44 paragraph (1) explains that any death shall be reported by the head of a neighborhood association or other names in the resident's domicile to the local Implementing Agency no later than 30 (thirty) days from the date of death. But there is still a lack of public awareness to report on the deaths and local authorities tend to wait for residents to report the event of death making the low number of death certificates issued, his is pushing the district kaur government to discipline the issue. Therefore the author takes the title about **“SERVICES OF DEATH ISSUING IN DEPARTMENT OF POPULATION AND LISTING OF KAUR CIVIL REGENCY PROVINCE BENGKULU”.**

This study aims to determine the extent to which the service issuance of death certificate conducted by the Department of Population and Civil Registry of the Kaur Regency as well as obstacles in providing services and efforts made to overcome these obstacles. The method used in this research is qualitative descriptive method with inductive approach descriptive statistical analysis techniques and data collection techniques used are observations, questionnaires or questionnaires, interviews, and documentation.

Based on the research results show the service of issuance of death certificate at the Department of Population and Civil Registry of the Kaur Regency has been running well and in accordance with the desired community, and get a good response from the community. But there are still other complaints that arise from the problem of unscrupulous personnel and facilities supporting services that are less adequate.

Suggestions that the authors point out for the civil service and kaur regency civil registration in order to further improve the service of the issuance of the death certificate which is already running well by providing guidance for all employees and complete the means support for the service process can run well.